

Nama : Aulya Syifa Zulkarnaen

NPM : 2313031009

Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

STUDI KASUS

“Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”

1. Analisis Struktur Pengeluaran

Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya dapat dikatakan belum optimal. Meskipun alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 22% dari APBD, sebagian besar anggaran, yaitu 68%, masih digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa anggaran pendidikan masih didominasi oleh belanja rutin, sementara kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan belum mendapat perhatian yang memadai.

Bagian yang perlu direalokasi:

- Belanja gaji dan tunjangan guru (68%) perlu ditekan secara bertahap melalui penataan distribusi guru agar lebih merata antara kota dan daerah terpencil.
- Program bantuan siswa (8%) perlu ditingkatkan karena masih banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan pendidikan.
- Infrastruktur digital perlu mendapat porsi anggaran yang lebih besar karena saat ini fasilitas teknologi masih sangat terbatas.
- Sebagian dana administrasi dapat dihemat melalui digitalisasi sistem manajemen sekolah.

Realisasi anggaran sebaiknya lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran daripada hanya membiayai kebutuhan rutin.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?

Pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya masih tergolong sangat bergantung pada pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari besarnya porsi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD, sementara keterlibatan pihak lain masih relatif terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah apabila pendapatan daerah menurun atau pemerintah harus mengalihkan anggaran untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Kemudian, tantangan pendidikan yang dihadapi Nusantara Raya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan operasional sekolah, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas guru, pemerataan tenaga pendidik, pembangunan infrastruktur digital, serta perluasan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. Kebutuhan tersebut memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga akan sulit dipenuhi apabila hanya mengandalkan APBD.

Perlu kah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif?

Menurut saya, keterlibatan sektor swasta dan berbagai skema pembiayaan alternatif yang sangat diperlukan. Namun, keterlibatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan sebagai pelengkap yang dapat memperkuat kapasitas pendanaan pendidikan.

Model Pembiayaan Alternatif yang Tepat

a. Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership/PPP)

Model ini dapat digunakan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di bidang teknologi dan digitalisasi sekolah. Misalnya, perusahaan teknologi dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam penyediaan jaringan internet, laboratorium komputer, atau platform pembelajaran digital.

Keunggulan model ini adalah pemerintah tidak harus menanggung seluruh biaya investasi sendiri, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

b. Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Perusahaan yang beroperasi di wilayah Nusantara Raya dapat diarahkan untuk berkontribusi melalui program CSR yang berfokus pada pendidikan. Bentuk dukungannya dapat berupa pemberian beasiswa, bantuan perangkat pembelajaran, renovasi sekolah, maupun pelatihan bagi guru.

Program CSR juga dapat difokuskan pada daerah terpencil yang selama ini mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan sehingga manfaatnya lebih merata.

c. Pembentukan Dana Abadi Pendidikan Daerah

Pemerintah daerah dapat mengalokasikan sebagian dana untuk membentuk dana abadi pendidikan yang dikelola secara profesional. Hasil pengembangan dana tersebut kemudian digunakan untuk mendanai program pendidikan dalam jangka panjang.

Skema ini penting karena dapat menciptakan sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan dan tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi APBD setiap tahun.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?

Beberapa praktik yang diterapkan negara-negara OECD dapat menjadi referensi bagi Provinsi Nusantara Raya karena terbukti mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

A. Performance-Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja)

Di banyak negara OECD, alokasi anggaran tidak hanya didasarkan pada jumlah sekolah atau peserta didik, tetapi juga mempertimbangkan capaian kinerja yang dihasilkan. Penerapan sistem ini dapat mendorong sekolah untuk lebih fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta pencapaian target pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Nusantara Raya, pendekatan ini dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada sekolah yang berhasil meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, memperbaiki tingkat kehadiran, atau menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, anggaran tidak hanya habis untuk kebutuhan administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

B. Pendanaan Berbasis Kebutuhan Siswa (Needs-Based Funding)

Negara-negara OECD umumnya mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan riil peserta didik dan kondisi sekolah. Sekolah yang berada di daerah terpencil, memiliki tingkat kemiskinan tinggi, atau menghadapi keterbatasan fasilitas biasanya memperoleh dukungan anggaran yang lebih besar. Prinsip ini sangat relevan bagi Nusantara Raya yang masih menghadapi kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa. Melalui sistem ini, sekolah di daerah terpencil dapat memperoleh tambahan anggaran untuk penyediaan guru, fasilitas belajar, akses internet, maupun program

pendampingan siswa. Dengan demikian, distribusi anggaran menjadi lebih adil dan mampu mengurangi ketimpangan pendidikan antarwilayah.

C. Fokus pada Peningkatan Kualitas Guru

Salah satu faktor utama keberhasilan pendidikan di negara OECD adalah kualitas guru yang terus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan profesional, dan evaluasi kompetensi secara berkala. Praktik ini sangat penting untuk diterapkan di Nusantara Raya karena besarnya anggaran untuk gaji guru belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengarahkan sebagian anggaran pada program pelatihan, penguasaan teknologi pembelajaran, serta pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Dengan guru yang lebih kompeten, kualitas pembelajaran juga akan meningkat.

D. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Negara-negara OECD umumnya menggunakan data sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pendidikan. Informasi mengenai hasil belajar siswa, distribusi guru, kondisi sarana prasarana, dan penggunaan anggaran dianalisis secara berkala untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat. Pendekatan ini dapat membantu Nusantara Raya mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini terjadi, seperti ketidakseimbangan distribusi guru dan ketimpangan fasilitas antarwilayah. Kebijakan yang didasarkan pada data cenderung lebih objektif, tepat sasaran, dan efektif dibandingkan kebijakan yang hanya berdasarkan asumsi atau pertimbangan administratif.

Tantangan Implementasi di konteks Indonesia

Elemen Praktik OECD	Manfaat bagi Nusantara Raya	Tantangan Implementasi
Performance-Based Budgeting	Mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif karena dana dialokasikan berdasarkan capaian kinerja sekolah.	Pengukuran kinerja sekolah masih belum merata dan memerlukan indikator yang objektif.
Pendanaan Berbasis Kebutuhan Siswa	Membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dengan memberikan dana lebih besar kepada sekolah yang membutuhkan.	Memerlukan data yang akurat agar alokasi anggaran tepat sasaran.
Peningkatan Kualitas Guru	Meningkatkan kompetensi guru sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik.	Distribusi guru belum merata dan akses pelatihan masih terbatas di beberapa daerah.
Sistem Evaluasi Berbasis Data	Membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.	Infrastruktur digital dan kapasitas pengelolaan data masih perlu ditingkatkan.

E. Proposal Reformasi Pembiayaan Pendidikan (2027-2031)

A. Perubahan Struktur Belanja

Reformasi pembiayaan perlu dimulai dari penataan kembali struktur anggaran agar lebih berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Saat ini, 68% anggaran masih digunakan untuk gaji dan tunjangan guru, sehingga ruang untuk program peningkatan kualitas pendidikan menjadi terbatas.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

- Menurunkan porsi belanja gaji dan tunjangan secara bertahap dari 68% menjadi sekitar 55–60% melalui redistribusi guru dan pengelolaan kebutuhan tenaga pendidik yang lebih efisien.
- Meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur dari 12% menjadi sekitar 20%, dengan fokus pada pembangunan fasilitas digital dan peningkatan akses internet sekolah.
- Meningkatkan program bantuan siswa dari 8% menjadi 12–15% agar siswa dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan belajar yang lebih baik.
- Menekan biaya administrasi melalui digitalisasi sistem pengelolaan sekolah sehingga anggaran dapat lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran.

B. Strategi Peningkatan Kualitas Guru

Peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas utama karena kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga pendidik.

Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- Melakukan redistribusi guru untuk mengatasi ketimpangan antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil.
- Memberikan insentif khusus bagi guru yang bersedia mengajar di wilayah terpencil atau daerah dengan kekurangan tenaga pendidik.
- Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala, terutama dalam bidang literasi, numerasi, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
- Menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada peningkatan kompetensi dan hasil belajar siswa.

C. Digitalisasi Sekolah

Digitalisasi diperlukan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan serta mendukung proses pembelajaran yang lebih modern dan efektif.

Program yang dapat dilaksanakan selama lima tahun meliputi:

- Penyediaan akses internet yang memadai di seluruh sekolah, terutama di daerah terpencil.
- Pengadaan perangkat teknologi seperti komputer, proyektor, dan perangkat pembelajaran digital lainnya.

- Pengembangan platform pembelajaran digital yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mendukung proses belajar mengajar.
- Digitalisasi administrasi sekolah agar pengelolaan data, keuangan, dan pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Agar reformasi berjalan sesuai tujuan, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan serta berbasis data.

Mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

- Menetapkan indikator kinerja utama, seperti peningkatan skor literasi dan numerasi, pemerataan distribusi guru, akses internet sekolah, dan angka partisipasi pendidikan.
- Melakukan evaluasi penggunaan anggaran dan capaian program setiap tahun untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
- Mengembangkan sistem data pendidikan terintegrasi yang dapat digunakan untuk memantau kondisi sekolah secara real time.
- Menyusun laporan kinerja tahunan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan penyesuaian program pada tahun berikutnya.

Dengan demikian untuk lima tahun ke depan, reformasi pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya perlu difokuskan pada pengalokasian anggaran yang lebih seimbang, peningkatan kualitas dan pemerataan guru, penguatan infrastruktur digital, serta penerapan sistem monitoring yang berbasis data. Melalui langkah tersebut, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata dan kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan dapat dikurangi secara bertahap.